

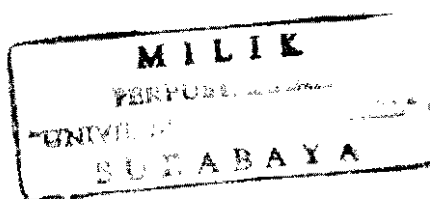
# SKRIPSI

*HENDRA PRAMONO*

## LISENSI HAK MEREK DITINJAU DARI UU NO. 19/1992 jo UU NO. 14/1997 DAN TRIPs



KK  
2/99  
Pra  
L



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1998

**LISENSI HAK MEREK DITINJAU DARI  
UU NO. 19/1992 jo UU NO. 14/1997 DAN TRIPs**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI  
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**



HK  
Pag. 2/99  
Pra  
E

**Pembimbing,**

**H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.**

**NIP. 130 325 843**

**Penyusun,**

**Hendra Pramono**

**NIM. 039514071**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1998**

Telah diuji dihadapan Tim Penguji Skripsi  
pada hari Senin, tanggal 28 Desember 1998

Tim Penguji Skripsi :

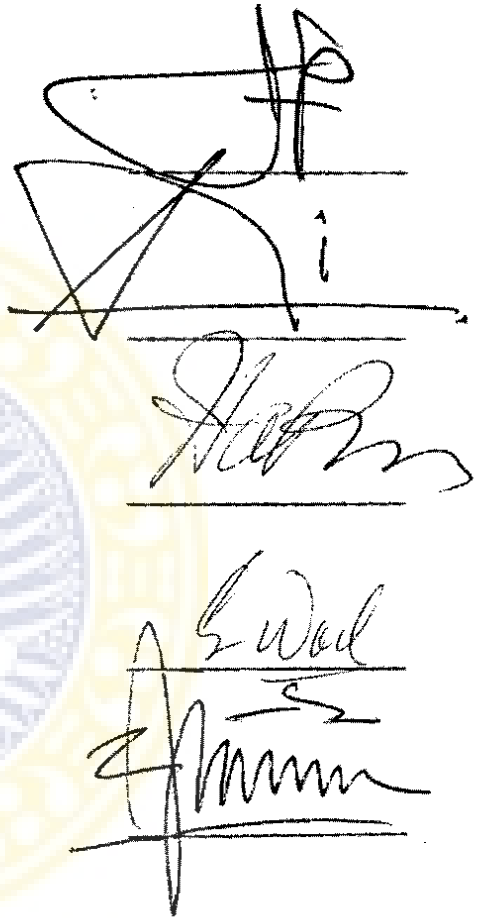
1. Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.

2. Anggota : 1. H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.

3. Sri Woelan Azis, S.H.

4. Rahmi Jened, S.H., M.H.



The block contains four handwritten signatures, each on a horizontal line. The first signature is at the top, followed by the second, third, and fourth signatures below it. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Ketentuan mengenai lisensi hak merek dalam UU No. 19/1992 jo UU No. 14/1997 sedikit banyak telah diharmonisasikan dengan TRIPs. Dalam ketentuan tersebut tetap memberi keleluasaan kepada pihak-pihak dalam perjanjian dan memberi kelonggaran terhadap iklim usaha. Sedangkan peraturan pelaksanaan mengenai perjanjian lisensi hak merek yang dibutuhkan belum terbentuk. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut juga diatur mengenai syarat dan tata cara agar perjanjian lisensi hak merek dapat dicatatkan.
- b. UU No. 14/1997 memuat ketentuan pengecualian atas penghapusan merek terdaftar dengan alasan *non use*. Disamping itu gugatan pembatalan atau penghapusan merek terdaftar dapat diajukan menjadi satu gugatan dengan tuntutan ganti rugi. Dan harus ada hubungan kausalitas antara kerugian yang ditimbulkan dengan adanya penggunaan merek yang bersangkutan.
- c. Adanya UU No. 10/1995 memberikan kesempatan bagi *licensor* maupun *licensee* untuk meminta kepada pengadilan untuk memerintahkan penghentian, penyerahan dan pengeluaran serta pemusnahan barang-barang yang menggunakan merek secara tanpa hak dari lalu-lintas perdagangan. Hal ini dilakukan agar tercipta penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak atas merek.

## 2. Saran

- a. Adanya keharusan untuk mencatatkan perjanjian lisensi hak merek menjadi penting bagi kepastian hukum para pihak yang bersangkutan (*licensor* dan *licensee*) maupun bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Sehingga pencatatan perjanjian lisensi hak merek haruslah dilakukan secermat mungkin oleh pegawai pencatat di Kantor Merek agar dapat dihindari adanya perjanjian lisensi hak merek yang merugikan pihak pemegang lisensi hak merek.
- b. Ketentuan mengenai larangan membuat perjanjian lisensi hak merek yang sering dimuati dengan syarat-syarat yang kurang menguntungkan *licensee* hendaknya memuat kriteria larangan tersebut. Dan hal ini dapat dilakukan melalui suatu peraturan pemerintah yang sangat diharapkan segera terbentuk. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah agar para pihak (*licensor* dan *licensee*) tidak ragu-ragu dalam membuat perjanjian lisensi hak merek.
- c. Penegakan hukum merek hendaknya dilakukan secara serius dan konsisten, agar dapat dihindarkan terjadinya kerugian bagi pemilik merek terdaftar maupun pemegang lisensi hak merek pada khususnya dan konsumen pada umumnya. Selain itu ketentuan mengenai pemusnahan barang hasil pelanggaran merek sebaiknya diikuti dengan tindakan aparat yang tegas dan transparan agar tidak menimbulkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).